**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD)**

**DI KABUPATEN ROKAN HULU**

**Makmur**

FakultasEkonomi, UniversitasPasirPengaraian

email: makmur\_melay@yahoo.com

***Abstract***

*The researchisis an evaluational study on the empowerment of Program village Performing at Rokan Hulu Regency Upstream, it was performed on december 2013 until May 2014. Te aims of this research is subject know the empowerment Program village performing at Village Rambah, and to analyse the credit channelizing by UED – SP . This research wasa case study on Economic Effort Saving and LendingKumu Jaya Village Rambah, with 60 persons, used random simpling. From the finding, it was found that the program has been applied well as the rules determined.*

*Keywords: Village Empowerment Program*

**Abstrak**

Penelitian tentang studi Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Kabupaten Rokan Hulu, telah dilaksanakan pada bulan Desember 2013 sampai Mei 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Rambah, dan menganalisis penyaluran kredit oleh UED – SP kepada pemanfaat.Penelitian ini merupakan studi kasus pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambah, dengan responden pemanfaat dana UED-SP yaitu sebanyak 60 orang, yang diambil secara acak sederhana.Hasil penelitian menunjukkan : Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Kata Kunci : Program Pemberdayaan Desa

**1. PENDAHULUAN**

Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Desember 2012 mencapai 28,59 juta orang (11,66%), menurun dibanding Maret 2012 yang tercatat 29,13 juta orang (11,96%), (BPS dalam Antara News 2/1/2013).Program penanggulangan kemiskinan *(pro-poor growth policy)* telah banyak dilakukan, baik secara nasional, ditingkat propinsi maupun yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun sering pada sasaran yang tidak semestinya menerima. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2003, (Kamira, dkk 2011 dalamElfindri, 2008) ada beberapa aspek yang menyebabkan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini berjalan tidak efektif, yaitu :

1. kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan setiapprogram masih terbatas;
2. masih terbatasnya database kemiskinan sehingga sulit menjadikan program tepat sasaran dan pengawasan program masih lemah;
3. kebanyakan program pengentasan kemiskinan terutama yang dibiayai pemerintah dan lembaga donor menggunakan *project to project* basis sehingga sulit menghasilkan proyek yang berkelanjutan;
4. masih maraknya praktek-praktek korupsi di Indonesia;
5. kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Ada beberapa faktor penting yang menyebabkan kesulitan dalam menilai dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia dan kebanyakan negara berkembang. Faktor tersebut antara lain adalah : tidak tepatnya dalam menetapkan sasaran, tidak berurutan waktu program, kurang pahamnya tenaga pemerintah dalam melaksanakan, termasuk korupsi, kurangnya persiapan tenaga dalam mendampingi program, kecilnya bentuk bantuan dan kurangnya informasi (Kamira, dkk 2011 dalam Elfindri, 2005).

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau mulai Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 (dalam Juta Jiwa) dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Riau 2004-2008

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah Penduduk Miskin** | **Persentase** |
| 2003 | 661,7 Ribu Jiwa | 15,6% Dari Total Penduduk |
| 2004 | 1.008,163 Ribu Jiwa | 22,19 % Dari Total Penduduk |
| 2007 | 574.5 Ribu Jiwa | 11,20 % Dari Total Penduduk |
| 2008 | 566.7 Ribu Jiwa | 10,63 % Dari Total Penduduk |

***Sumber : Biro Pusat Statistik, 2008***

Tabel 1.2. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau Menurut Daerah, tahun 2002-2008

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (ribu) | | | Persentase Penduduk Miskin | | |
| Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa |
| 2002 | n.a | n.a | 635,0 | n.a | n.a | 15,39 |
| 2003 | n.a | n.a | 660,7 | n.a | n.a | 14,97 |
| 2004 | n.a | n.a | 658,6 | n.a | n.a | 14,67 |
| 2005 | 199,9 | 400,5 | 600,4 | 8,26 | 16,82 | 12,51 |
| 2006 | 226,3 | 338,6 | 564,9 | 9,37 | 14,40 | 11,85 |
| 2007 | 246,4 | 328,1 | 574,5 | 9,53 | 12,90 | 11,20 |
| 2008 | 245,1 | 321,6 | 566,7 | 9,12 | 12,16 | 10,63 |

***Sumber : BPS, Diolah dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)***

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini sangat diperlukan suatu proses pemberdayaan, dimana keberdayaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung sebagai prasyaratnya. Diantaranya adalah faktor pendidikan, kesehatan, penguasaan akses sumber-sumber kemajuan ekonomi dan faktor sosial budaya.

Desa Rambah dengan ibu negerinya di Kumu berdiri sejak tahun 2000 dengan luas wilayah lebih kurang 44,54 Km2.

Program Pemberdayaan Desa, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) masuk ke Desa Rambah sekitar Bulan Mei tahun 2011. Desa Rambah memperoleh dana sebesar Rp **500.000.000** dari APBD Provinsi Riau. Setelah melalui beberapa proses yang dimulai dari Musyawarah Desa (MD), Musyawarah Dusun (Musdus), dilanjutkan dengan pencairan dari Bank Riau Kepri dan penyerahan kepada masyarakat (Pemanfaat) dalam bentuk kredit.

Perkembangan Dana UED-SP Kumu Jaya Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2013 Selengkapnya dapat dilihat pada tabel1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3. Perkembangan Dana UED-SP Kumu Jaya Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2013.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Keterangan** | **Jumlah** |
| **1** | **Dana Awal dari Provinsi Riau** | **Rp 500.000.000** |  |
| **2** | **Jumlah Pemanfaat dan Perkembangan Transaksi** |  |  |
| a | Perdagangan | 61 orang | Rp 574.000.000 |
| b | Pertanian | 1 orang | Rp 5.000.000 |
| c | Perkebunan | 108 orang | Rp 749.000.000 |
| d | Perikanan | - | - |
| e | Peternakan | - | - |
| f | Industry Kecil | 2 orang | Rp 11.000.000 |
| g | Jasa | 14 orang | Rp 125.000.000 |
| 3 | **Jumlah Total** | **186 orang** | **Rp 1.464.000.000** |
| 4 | Perkembangan Dana | Rp 97.504.445 | |
| 5 | Kas | Rp 74.000.000 | |
| 6 | Bank | Rp 86.797 | |
| 7 | Tingkat Pengembalian | 98% | |
| 8 | Tunggakan | Rp 38.952.222 | |
| 9 | Dana Beredar diMasyarakat | Rp 490.243.000 | |
| 10 | Total SHU | Rp 45.897.353 | |
| 11 | PADes | Rp 4.589.736 | |

*Sumber :UED-SP Kumu Jaya Desa Rambah Tahun 2013*

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat sebenarnya mengacu pada kata *“Empowerment”*, yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat pedesaan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikanperanan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri.

Lebih lanjut Payne (1997:266), mengatakan bahwa:  
*“Empowerment seeks to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients”.*  
(Pemberdayaan dipandang untuk menolong klien dengan membangkitkan tenaga dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan sepanjang hidup, termasuk mengurangi efek atau akibat dari gejala- gejala pada masyarakat atau individu untuk melatih agar kekuatan itu tumbuh dengan meningkatkan kapasitas percaya diri, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya).

Pendekataan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia *(people centered development)* melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat pedesaan terhadap lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia *(people centered development),* yang melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal *(community based resource management).*

MenurutSumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya,mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Emiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggungjawab atas tindakannya.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud denganmasyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi,berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai *alternative,* mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengansituasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

**Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari [pemberdayaan masyarakat adalah](http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html) untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

**Pengertian Evaluasi**

Evaluasi adalah suatu penilaian berkala terhadap *relevansi*, prestasi,efisiensi dan dampak proyek dalam konteks tujuan yang telah disepakati. Evaluasi

memanfaatkan sistim informasi. Sistim tersebut termasuk fisik dasar, catatankeuangan, rincian, masukan dan pelayanan yang disediakan untuk para pemanfaat

(misalnya kredit dan penyuluhan) tetapi dengan suatu pandangan terhadapperbandingannya dari waktu ke waktu terhadap informasi kontrol yangdiperbandingkan (Casley, 1991).

**Program Pemberdayaan Desa (PPD)**

Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. **Program Pemberdayaan Desa (PPD)** merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau.

Seluruh proses kegiatan dalam PPD pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan.

**Tujuan Khusus PPD**

Tujuan dilaksanakannya Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau secara khusus adalah untuk :

1. Mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa/kelurahan.
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan.
4. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir.
5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
6. Meningkatkan kebiasaan gotong-royong dan gemar menabung secara tertib.
7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan.
8. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan

**Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Berkembangnya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi perdesaan/kelurahan yang sehat dan berdaya saing tinggi.
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar sarana dan prasarana penunjang ekonomi, pendidikan dan infra struktur desa/kelurahan melalui pembangunan yang tumbuh dari bawah (*Bottom Up*) yang diimplementasikan oleh seluruh Dinas Instansi Sektoral baik provinsi maupun kabupaten/kota.
3. Melembagakan sistem perencanaan partisipatif di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui peran aktif Dinas dan Sektoral.

**Jenis Kegiatan PPD**

Dalam implementasinya jenis kegiatan pada Program Pemberdayaan Desa meliputi :

* 1. Kegiatan reguler perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui Sektoral.
  2. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan – Simpan Pinjam (UED/K-SP).

Untuk menjamin pemahaman mekanisme dan tujuan program, maka sosialisasi program wajib dilaksanakan oleh Penanggungjawab Pelaksana Program baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

**Evaluasi Program PPD**

Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana perkembangan /kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanakan program selama periode tertentu. Evaluasi dapat dilakukan secara parsial atau secara menyeluruh seluruh aspek pelaksanaan PPD yang memuat data serta analisa yang menyeluruh, sistematis serta objektif, untuk mengukur tingkat keberhasilan PPD sebagai sebuah program unggulan dalam mendukung upaya menanggulangi masalah Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur (K2I) di Provinsi Riau. Dasar utama dalam evaluasi kinerja ini menggunakan Pedoman Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Desa (PPD) sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau NO.KPTS.537/XII/2005 tentang Penetapan Pedoman Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, yang ditandatangani oleh Gubernur Riau tanggal 13 Desember 2005.

**Evaluasi Internal**

Evaluasi internal PPD bertujuan, antara lain:

* Mengetahui capaian yang telah diperoleh selama berlangsungnya program, terutama menyangkut ketiga aspek PPD, yaitu Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi, dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan.
* Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan oleh program. Mencari akar permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut.

Evaluasi internal diperlukan sebagai bahan masukan bagi perbaikan kinerja program ke depan, biasanya dilakukan pada tahun pertama, kedua dan ketiga pelaksanaan PPD.

Mendapatkan sudut pandang sama dalam melakukan penilaian terhadap program, maka telah dibuat Panduan Evaluasi Kinerja PPD yang berisikan indikator-indikator yang harus dicapai selama tahun pertama, kedua dan ketiga pelaksanaan program.

**Evaluasi Eksternal**

Evaluasi eksternal merupakan tindak lanjut dari evaluasi internal. Evaluasi eksternal biasanya dilakukan oleh tim evaluasi independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.

Pelaksanaan evaluasi eksternal pada PPD direncanakan setelah 3 tahun (satu siklus) pelaksanaan program. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja program secara keseluruhan dan untuk mengetahui dampak program terhadap perkembangan masyarakat desa/kelurahan lokasi PPD

**3. METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian Lokasi dan Waktu penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, Penelitian ini bersifat kualitatif. Lokasi penelitian Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambah kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2014.

**Fokus Kajian**

Fokus Evaluasiterhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) ditetapkan berdasarkan bukuPedoman Umum dan Buku Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau. Yang menjadi Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu : Sosialisasi, Penggunaan Dana, Manfaat, Pembinaan,Monitoring, Sasaran/ Penerima Dana, Tingkat Pengembalian.

**Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini mencakup data primer dan datasekunder. Data sekunder diperoleh dari survey awal. Sedangkan data primerdiperoleh di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan datayaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, serta angket *(Quesionaire).*

**Metode Pengambilan Sampel**

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemanfaat dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambah dengan jumlah populasi sebanyak 186 orang, dari jumlah tersebut diambil sampel sebanyak 60 orang pemanfaat yang dipilih secara acak sederhana.

**Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dilapangan diidentifikasi, diolah dan dianalisasecara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan fokus kajian yangtelah diteliti sehingga dapat menjelaskan bagaimana kondisi pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Rambah.Hasil analisis pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Rambah dibandingkan denganbuku pedoman/petunjuk, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan programtersebut telah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Karakteristik Pemanfaat UED-SP**

Karakteristik pemanfaat yang dibahas dalam penelitian ini meliputi, umur,tingkat pendidikan, jenis kelamin,dan pekerjaan. Umurdapat memberikan gambaran tentang kemampuan fisik seseorang dalam berusaha dan bekerja, jenis kelamin melihat seberapa jauh keterlibatan gender dalam program, pendidikan dan pekerjaan menentukan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dana dan peruntukan dana. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.Distribusi Umur, Pendidikan, Jenis Kelamin,dan Pekerjaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Karakteristik Responden | Jumlah | |
| n | Persentase (%) |
| 1 | Umur(Tahun)  26 - 35  36 – 45  46 - 55  > 55 | 16  21  14  9 | 26,67  35, 00  23,33  15,00 |
| Jumlah | | 60 | 100% |
| 2 | Pendidikan  SD  SMP/ Sederajat  SMA/ Sederajat  D1 – S1 | 28  13  15  4 | 46,67  21, 67  25, 00  6,67 |
| Jumlah | | 60 | 100% |
| 3 | Jenis Kelamin  Laki-Laki  Perempuan | 45  15 | 75,00  25,00 |
| Jumlah | | 20,95 |  |
| 4 | Jenis Pekerjaan  Tani  Swasta  PNS  Ibu Rumah Tangga | 14  32  5  9 | 23,33  53,33  8,33  15,00 |
| Jumlah | | 60 | 100% |

**Umur**

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas umur pemanfaat UED-SP kumu Jaya Desa Rambah berusia antara 36-45 tahun. yang berarti pemanfaat tergolong kelompok usia produktif.

Hal ini sesuai dengan pendapat simanjuntak (1999) yang mengatakan bahwa penduduk umur 15 – 55tahun termasuk kedalam usia produktif, dimana pada golongan usia ini akan lebih mudah menerima inovasi yang didukung oleh kemampuan fisik dan kemampuan berfikir yang baik. Disamping itu, usia seseorang yang produktif akan membuat seseorang lebih mudah dalam menerima teknologi baru, bila dibandingkan dengan usia non produktif.

**Pendidikan**

Tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan daya nalar dan sikap atau prilaku pemanfaat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka cendrung usaha yang dikelola lebih rasional dengan memanfaatkan pendidikan yang dimiliki baik yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal.

Tingkat pendidikan pemanfaat cenderung bervariasi, tingkat pendidikan pemanfaat berkisar dari Sekolah Dasar (SD) sampai jenjang pendidikan Diploma dan Strata 1,

Dari Tabel 4.1dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan pemanfaat yang terbanyak adalah SD berjumlah 28 orang (46,67%), diikuti SMA/sederat 15 orang (25,00%), SMP/sederajat 13 orang (21,67%), sedangkan Diploma-Sarjana hanya 4 orang (6,67%). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaat UED-SP kumu Jaya Desa Rambah tingkat pendidikannya masih rendah yaitu hanya Sekolah Dasar (SD).

**Jenis Kelamin**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwapemanfaatdana UED-SP Kumu Jaya Desa Rambah masih didominasi oleh kaum laki-laki yaitu sebanyak 45 orang (75,00%), sedangkan kaum perempuan hanya sebanyak 15 orang (15,00%). Hal ini menjadi perhatian yang serius bagi pihak-pihak terkait, karena keterwakilan perempuan dalam program UED-SP menjadi syarat yang mutlak.Program mempersyaratkan bahwa pemanfaat dan pengelola UED-SP harus melibatkan kaum perempuan.

**Jenis Pekerjaan**

Pekerjaan merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pemanfaat dalam mengambil keputusan untuk menggunakan dana yang dipinjamnyaguna mendapatkan hasil yang lebih baik serta mengurangi resiko kegagalan yang mungkin dialaminya. Pada umumnya pemanfaat dalam menggunakan dana melakukan usahaselalu berpedoman padapekerjaan yang dilakukanya sehari-hari.

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pemanfaat yang meminjam dana di UED-SP Kumu Jaya Desa Rambah adalah swasta, Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan program pemberdayaan masyarakat yaitu menberikan pinjaman kredit untuk pengembangan usaha kecil dan menengah.

**Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Program PPD dengan Ketentuan**

Analisis kesesuaian pelaksanaan program adalah membandingkan antara pelaksanaan program dengan apa yang seharusnya menurut ketentuan. Ketentuan yang dipedomani dalam mengevaluasi adalah buku Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis PPD yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau.

**Sosialisasi Program**

Tanggapan Responden yang Memahami Maksud dan Tujuan Program PPD, yang disampaikan dalam forum Musyawarah Desa/Kelurahan I dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2. Tanggapan Responden yang Memahami Maksud dan Tujuan Program PPD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Alternatif Jawaban | Jumlah Responden | Persentase |
| 1  2  3 | Paham  Kurang Paham  Tidak Paham | 42  14  4 | 70,00%  23,55%  6,67% |
| Jumlah | | 60 | 100 |

Pada Tabel 4.2. memperlihatkan bahwa dari 60 orang responden, yangmemahami tentang maksud dan tujuan program Pemberdayaan Desa (PPD) sebanyak 42 orang (70,00%), sedangkan 14 orang (23,55%) diantaranya kurang memahami dan 4 orang (6,67%) tidak paham dengan maksud dan tujuan PPD.

**Peruntukan Dana**

Pemanfaat wajib membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan dan tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K). Perubahan-perubahan terhadap jenis usaha yang didanai melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan, harus melalui proses verifikasi dilengkapi dengan berita acara

Tabel 4.3. Tanggapan Responden yang Menggunakan Dana Bergulir Sesuai dengan rencana Kegiatan (SP2K).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Alternatif Jawaban | Jumlah Responden | Persentase |
| 1  2  3 | Sesuai RUP  Kurang Sesuai RUP  Tidak Sesuai RUP | 51  3  6 | 85,00%  5,00%  10,00% |
| Jumlah | | 60 | 100 |

Pada Tabel 4.3. memperlihatkan bahwa dari 60 orang responden, yang menggunakan dana sesuai Rencana Usaha Pemanfaat (RUP) sebanyak 51 orang (85,00%), sedangkan 3 orang (5,00%) diantaranya kurang sesuai dengan RUP dan 6 orang (10,00%) tidak sesuai dengan RUP.

**Manfaat**

Tabel 4.4. Tanggapan Responden Terhadap Peningkatan Pendapatan Setelah Menggunakan Dana Bergulir

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Alternatif Jawaban | Jumlah Responden | Persentase |
| 1  2  3 | Pendapatan Meningkat  Kurang Meningkat  Tidak Meningkat | 47  4  9 | 78,33%  6,67%  15,00% |
| Jumlah | | 60 | 100 |

Berdasarkan Tabel 4.4. dapat dilihat bahwa dari 60 orang responden, yangpendapatannya meningkat setelah menggunakan dana UED-SP adalah sebanyak 47 orang (78,33%), sedangkan 4 orang (6,67%) diantaranya kurang meningkat dan 9 orang (15,00%) tidak meningkat pendapatannya.

Sedangkan data tentang perkembangan usaha responden setelah mendapatkan dana bergulir dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Tanggapan Responden Terhadap Perkembangan Usaha Setelah Menggunakan Dana Bergulir

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Alternatif Jawaban | Jumlah Responden | Persentase |
| 1  2  3 | Berkembang  Kurang Berkembang  Tidak Berkembang | 53  5  2 | 88,33%  8,33%  3,33% |
| Jumlah | | 60 | 100 |

Pada Tabel 4.5. memperlihatkan bahwa dari 60 orang responden, yang usahanya berkembang setelah mendapatkan dana UED-SP adalah sebanyak 53 orang (88,00%), sedangkan 5 orang (8,33%) diantaranya kurang berkembang dan 2 orang (3,33%) tidak berkembang.

**PendampinganOleh Fasilitator/ Pendamping Desa**

Perangkat Desa/Kelurahan, BPD, Pengelola UED/K-SP, Pendamping Desa harus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota/kelompok Pemanfaat dana usaha desa.

Tabel 4.6. Tanggapan Responden Terhadap Pendampingan oleh Fasilitator

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Alternatif Jawaban | Jumlah Responden | Persentase |
| 1  2  3 | Didampingi  Kurang Didampingi  Tidak Didampingi | 29  31  0 | 48,33%  51,67%  0,00% |
| Jumlah | | 60 | 100 |

Dari Tabel 4.6. dapat dilihat bahwa dari 60 orang responden, yangmerasa mendapat pendampingan oleh fasilitator adalah sebanyak 29 orang (48,33%), sedangkan 31 orang (51,67%)merasa kurang didampingi.

Berdasarkan hal diatas terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang merasa kurang mendapat pendampingan oleh fasilitor, untuk itu kedepannya peran fasilitator program lebih ditingkatkan lagi dalam mendampingi pemanfaat.

**Bimbingan Oleh Pengelola**

Tabel 4.7. Tanggapan Responden Terhadap Bimbingan oleh Pengelola

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Alternatif Jawaban | Jumlah Responden | Persentase |
| 1  2  3 | Dibimbing  Kurang Dibimbing  Tidak Dibimbing | 54  4  2 | 90,00%  6,67%  3,33% |
| Jumlah | | 60 | 100 |

Dari Tabel 4.7. dapat dilihat bahwa dari 60 orang responden, yang merasa mendapat bimbingan oleh pengelola adalah sebanyak 54 orang (90,00%), sedangkan 4 orang (6,67%)merasa kurang didampingi dan sebanyak 2 orang (3,33%) responden merasa tidak dibimbing.

Bimbingan yang dilakukan oleh pengelola wajib dilakukan minimal sekali dalam sebulan sesuai dengan petunjuk teknis program PPD, disamping itu juga pengelola wajib melakukan Rapat Koordinasi Desa (RAKORDES) sekali dalam sebulan.

Tabel 4.8. Tanggapan Responden Terhadap Rapat Koordinasi Bulanan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Alternatif Jawaban | Jumlah Responden | Persentase |
| 1  2  3 | Rutin Setiap Bulan  Kadang-kadang  Tidak Pernah | 0  56  4 | 0,00%  93,33%  6,67% |
| Jumlah | | 60 | 100 |

Dari Tabel 4.7. dapat dilihat bahwa dari 60 orang responden, yangmengatakan diadakan rapat koordinasi setiap bulan tidak ada, (0,00%), sedangkan menyatakan rapat koordinasi diadakan tidak secara rutin sebanyak 56 orang (93,33%)dan mengatakan tidak pernah diadakan rapat koordinasi sebanyak 4 orang (6,67%).

**Kesesuaian Penyaluran Dana**

**a. Penerima Pinjaman**

Salah satu tujuan khusus dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.

Tabel 4.8. Tanggapan Responden Terhadap Sasaran Penerima Pinjaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Alternatif Jawaban | Jumlah Responden | Persentase |
| 1  2  3 | Tepat Sasaran  Kurang Tepat Sasaran  Tidak Tepat Sasaran | 49  6  5 | 81,67%  10,00%  8,33% |
| Jumlah | | 60 | 100 |

Dari Tabel 4.8. dapat dilihat bahwa dari 60 orang responden, sebanyak 49 orang (81,67%) tepat sasaran, sedangkan 6 orang (10,00%)kurang tepat sasaran dan sebanyak 5 orang (8,33%) responden tidak tepat sasaran.

Pada Tabel 5.8. dapat disimpulkan bahwa mayoritas pemanfaat dana UED-SP sudah tepat sasaran.

**Tingkat Pengembalian**

Tabel 4.9. Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Pengembalian Pinjaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Alternatif Jawaban | Jumlah Responden | Persentase |
| 1  2  3 | Lancar  Kurang Lancar  Tidak Lancar | 33  19  8 | 55,00%  31,67%  13,33% |
| Jumlah | | 60 | 100 |

Tabel 4.9. memperlihatkan bahwa dari 60 orang responden, sebanyak 33 orang (55,00%) diantaranya lancar dalam pengembalian dan 19 orang (31,67%) kurang lancar, sementara 8 orang (13,33%) tidak lancar dalam pengembalian dana.

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini dapat dilihat dari tanggapan responden dari fokus kajian dengan 8 sub kajian, sebanyak 5 sub kajian dilaksanakan lebih dari 75% sesuai ketentuan yaitu: Penggunaan Dana, Manfaat, Perkembangan Usaha, Bimbingan Pengelola dan Sasaran Pemanfaat. sedangkan 3 lainnya dibawah 75%, terdiri dari: Sosialisasi, pendampingan oleh Fasilitator dan Tingkat Pengembalian.
2. Pelaksanaan penyaluran dana Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambah oleh Pegelola dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, semuanya dilaksanakan lebih dari 75% sesuai dengan ketentuan.

**Saran**

Adapun saran-saran yang dapat sampaikan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk kemajuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambah, perlu diadakan perbaikandalam pelaksanaan dilapangan terutama dalam sosialisasi program kepadapemanfaat. Disamping itu perlu meningkatkan pembinaan, pembimbingan danpengawasan oleh fasilitator program.
2. Dalam penyaluran dana bergulir, diharapkan agar pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambahagar lebih baik lagi dalam menyeleksi penerima pinjaman untuk mengurangi terjadinya tunggakan.
3. Diharapkan kepada pihak terkait agar bisa memberikan tambahan modal untuk mengurangi daftar antrian pemanfaat yang ingin menggunakan dana tersebut.

**6. DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik, 2008

Caslay, Dennis J dan Khrisna Kumar (1991). *Pemanfaatan dan Evaluasi Proyek Pertanian*.Terjemahan, Jakarta UI .

Desi Kamira dkk (2011). *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kota Padang* Program Pasca Sarjana Universitas AndalasPadang.

Elfindri, 2005.*Kajian Tingkat Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan SumateraBarat, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Lembaga Pengkajian Ekonomi Pembangunan (LPEP)*, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas,Padang.

KeputusanGubernur Riau (2009). Tentang PetunjukTeknis ProgramPemberdayaanDesa (PPD) Provinsi Riau

Moelyarto,Vidhyandika, (1996). *“PemberdayaanKelompokMiskinMelaluiProgram IDT*.“DalamOnnyS.Prijonodan A.M.W. Pranarka (ed).20.*PemberdayaanKonsep, KebijakandanImplementasi*, CSIS, Jakarta.

Owin Jamasy (2004).*Keadilan Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan,* Mizan Pustaka, Jakarta

Payne M.  1997.  *Modern Social Work Theory*.  Edisi Kedua.  London: MacMillPress Ltd.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang PedomanUmumProgram PemberdayaanDesa(PPD)ProvinsiRiau*

Slamet, Y. (1993). *Pembangunan MasyarakatBerwawasanPartisipasi*. SebelasMaretUniversity Press. Surakarta.

Sulistyani Ambar Teguh (2004).*Kemiskinan dan Model pemberdayaan*, Gava Media Jakarta

Sumardjo (1999).*Transformasi Model Penyuluhan PertanianMenuju Pengembangan Kemandirian Petani Bogor*, Disertasi Doktor Program Pascasarjan Institut Pertanian Bogor